



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

**BPPMHKP
MANADO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Intansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado tahun 2025 adalah mengacuh pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Selama tahun 2025 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.



Laporan Kinerja BKIPM Manado Tahun 2025

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2025 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Manado, 15 Januari 2026


Dolly Novela Rawung, S.St.Pi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada tahun 2025, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Triwulan IV Tahun 2025 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	1
Tujuan	3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Manado ..	4
Sistematika dan Penyajian	8
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Rencana Strategis 2020-2024	9
Rencana Kinerja 2022	19
Anggaran Balai KIPM Manado	21
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	24
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
 BAB IV Penutup	40
Lampiran	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2025	20
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	22
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN IV 2025	25
Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Kegiatan	39

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2021-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Manado dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan tangan dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado (BPPMHKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Manado yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado, maka disusun Pelaporan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

TUJUAN

Pelaporan Kinerja Tahun 2025 ini di susun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Manado yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

I. Kepala

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merupakan unit pelaksana teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Manado adalah jabatan struktural Eselon III a yang membawahi 1 (satu) jabatan Struktural Eselon IV a dan 2 (dua) jabatan fungsional sub koordinator dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional,

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Struktural bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan umum dan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan

laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator

serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2025.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Manado.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2025.
4. **BAB III. Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.
5. **BAB I. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 2025, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, Rencana Strategis 2021-2024, serta Penetapan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2021 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2021-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Manado menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2021-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2021-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dari program yang dilaksanakan yaitu:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

Arah Kebijakan BPPMHKP Manado

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju

dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, salah satu agenda pembangunan yang diusung oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan;
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasle;
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan karantina;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasle;
6. kegiatan inspeksi dan surveillance sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium pengujian;
10. meningkatkan kompetensi laboran dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium;

11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan;

Disamping dua agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik;

5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM Manado. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi

dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM Manado dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2021-2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional. Selain itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan peningkatan kualitas layanan sertifikasi melalui layanan berbasis digital dan penyediaan full service 1 x 24 jam setiap hari kepada pengguna jasa. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan instansi terkait ataupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Utara ke beberapa Negara tujuan ekspor, seperti yang telah dilakukan awal tahun 2023 yang mana Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Manado dan BEA Cukai Manado telah berhasil mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari bandara samratulangi manado ke Jepang. Direct call ekspor merupakan salah satu instrumen sebagai upaya meningkatkan daya saing, volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara karena dengan direct call ini maka efesiensi waktu dan biaya dapat dilakukan.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah modernisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Kantor pelayanan Bea Cukai Manado dan Bitung. Selain itu untuk memperlancar arus barang juga dilakukan upaya bersama instansi terkait dalam mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Manado ke Negara-negara tujuan ekspor yang potensial.

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboran dan menambah ruang lingkup pengujian laboratorium.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

RENCANA KINERJA 2025

Rencana kinerja Tahun 2025, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2025 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Manado diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan peta strategi (*strategy map*) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2025. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tersebut diturunkan (*cascading process*) ke sub koordinator sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Manado Tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

S	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	92	
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	71.5	
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	87	

		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	86	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	76	
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	1	
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88	

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2025 sebesar) Rp.10.077.579.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan

prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	355.000.000,-
2	Manajemen Mutu	167.000.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.555.579.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2025		10.077.579.000

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka Maksimum adalah 120;
2. Angka Minimum adalah 0;

3. Formula Penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda sebagaimana penelasa berikut :

- a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah reaalisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	% Capaian
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	164.00	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	98.00	120%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	100.00	101.01 %
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	87.67	116.89%
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	92.22	120%
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	92	98.52	107.08%
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	99.83	120%

		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	100	100	100%
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	87	79.00	90.80%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	82	81.04	98.83%
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	100	117.65%
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	76	100	120%
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	75.15	100.20%
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	1	1	100%
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	3.36	3.69	109.82%

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

I. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan mejadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 164% sehingga capaiannya menjadi 120%

IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses,

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 98% sehingga capaiannya menjadi 120%

IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2025 ini IKU ini pada Balai KIPM Manado ditargetkan 99% dan telah tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 101.01%.

II. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP

IKU 4. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif

3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 ini IKU ini ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 87.67 hingga capaiannya menjadi 116.89%

IKU 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada tahun 2025 IKU ini ditargetkan indeks 75 dan terealisasi menjadi 99.22 sehingga capaiannya menjadi 120%

III. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung

indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada Tahun 2025 target yang ditentukan pada IKU ini 92 dan tercapai 98.52 sehingga capaiannya menjadi 107.08%

IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori

Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;

4. Kurang, apabila NKA $>50 - 60$;

5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Indikator ini pada tahun 2025 dengan target 75 tercapai 99.83 hingga capaiannya menjadi 120%

IKU 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Tahun 2025 target 100 tercapai 100 hingga capaiannya menjadi 100%.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal

ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada Tahun 2025 indikator ini ditetapkan 82 tercapai 81,04 sehingga capaiannya menjadi 98.83% .

IKU 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Pada Tahun 2025 IKU ini dengan target 86 dan tercapai 87 sehingga capaiannya menjadi 101.16%

IKU 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Pada Tahun 2025 indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan dengan target 85 tercapai 100 sehingga capaiannya menjadi 117.65%.

IKU 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pada Tahun 2025 Indikator ini target 76 dan tercapai 100 sehingga capaiannya menjadi 120%

IKU 14. Inovasi Pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan

Kelompok inovasi: umum, khusus

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.

- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pada Tahun 2025 Target indikator ini sebesar 1 dan tercapai 1 sehingga capaiannya menjadi 100%

IKU 15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP (Indeks)

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan 3.36 dan tercapai 3.69 sehingga capaiannya menjadi 109.82%

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado di awal Tahun 2025 sebesar Rp. 10.077.579.000,- dan terjadi revisi anggaran sehingga pada Tahun 2025 anggaran yang tersedia sebesar Rp 8.920.730.000 dan adanya pagu blokir sebesar Rp.285.660.000,- sehingga pagu efektif menjadi Rp. 8.635.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.190.850.711 sehingga capaiannya menjadi 94.86%. disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan
Tahun 2025**

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi DIPA (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	5.445.022.000	-	5.445.022.000	5.012.830.852	92.06
Belanja barang (52)	3.475.708.000	285.680.000	3.190.048.000	3.178.019.859	99.62
Belanja Modal (53)	-	-	-	0	0
Total	8.920.730.000		8.635.070.000	8.190.850.711	94.86

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, dari 15 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua indikator capaiannya sesuai dan Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan IV 2025 sesuai dengan target. Hanya satu target yang tidak tercapai yaitu Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado dengan target 82 tetapi hanya tercapai 81,04, tetapi secara keseluruhan capaian IKU Balai KIPM Manado di Tahun 2025 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Triwulan IV 2025 dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, BPPMHKP Manado tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens antara Pusat dan UPT untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.

2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran masing-masing indikator kinerja untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah serta instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlu adanya program/kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara.
5. Perlu adanya dorongan untuk pegawai dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan mandiri untuk meningkatkan IP ASN pegawai.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja BPPMHKP Manado Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu
sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

7 Januari 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengisian capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Target capaian indikator kinerja utama tahun 2025 untuk Sistem Manajemen Mutu Laboratorium adalah 75 (nilai) dan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi adalah 75 (nilai).
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan I adalah sebesar 89,91 (119,88%); nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 85,75 (114,33%); nilai capaian Triwulan III adalah sebesar 88,24 (117,65%); dan nilai capaian Triwulan IV adalah sebesar 83,72 (111,63%). Capaian indikator kinerja utama sampai dengan triwulan IV (capaian tahunan) tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebesar 86,91 (115,88%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran II.
3. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan I adalah sebesar 93,22 (124,29%); nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 89,81 (119,75%); nilai capaian Triwulan III adalah sebesar 86,53 (115,37%); dan nilai capaian Triwulan IV adalah sebesar 89,44 (119,25%). Capaian indikator kinerja utama sampai dengan triwulan IV (capaian tahunan) tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebesar 89,75 (119,67%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran III.

4. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariat

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I. Daftar Tujuan Surat
Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Jakarta I
2. Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Makassar
3. Plt. Kepala BUSPMHKP
4. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jakarta II
5. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya I
6. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya II
7. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Semarang
8. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Denpasar
9. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Mataram
10. Kepala Balai BPPMHKP Lampung
11. Kepala Balai BPPMHKP Medan I
12. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tanjung Pinang
13. Kepala Balai BPPMHKP Balikpapan
14. Kepala Balai BPPMHKP Banjarmasin
15. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Entikong
16. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tarakan
17. Kepala Balai BPPMHKP Ambon
18. Kepala Balai BPPMHKP Manado
19. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jayapura
20. Kepala Stasiun BPPMHKP Cirebon
21. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Yogyakarta
22. Kepala Stasiun BPPMHKP Bandung
23. Kepala Stasiun BPPMHKP Merak
24. Kepala Stasiun BPPMHKP Aceh
25. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Medan II
26. Kepala Stasiun BPPMHKP Batam
27. Kepala Stasiun BPPMHKP Pekanbaru
28. Kepala Stasiun BPPMHKP Palembang

29. Kepala Stasiun BPPMHKP Jambi
30. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Padang
31. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Bengkulu
32. Kepala Stasiun BPPMHKP Pangkal Pinang
33. Kepala Stasiun BPPMHKP Bima
34. Kepala Stasiun BPPMHKP Kupang
35. Kepala Stasiun BPPMHKP Pontianak
36. Kepala Stasiun BPPMHKP Palangkaraya
37. Kepala Stasiun BPPMHKP Palu
38. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Kendari
39. Kepala Stasiun BPPMHKP Bau-bau
40. Kepala Stasiun BPPMHKP Gorontalo
41. Kepala Stasiun BPPMHKP Mamuju
42. Kepala Stasiun BPPMHKP Ternate
43. Kepala Stasiun BPPMHKP Luwuk Banggai
44. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjung Balai Asahan
45. Kepala Stasiun BPPMHKP Tahuna
46. Kepala Stasiun BPPMHKP Merauke
47. Kepala Stasiun BPPMHKP Sorong

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

CAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan I

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Makassar	91,23	<i>Remote verification</i>	20 Maret 2025
2	Pangkalpinang	88,58	<i>Remote verification</i>	21 Maret 2025
	Rata-Rata	89,91		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan II

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Cirebon	93,89	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
2	Jakarta II	82,45	Verifikasi langsung	16-17 April 2025
3	Jambi	89,64	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
4	Kendari	76,32	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
5	Kupang	80,18	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
6	Manado	87,67	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
7	Mataram	87,84	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Merak	81,14	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
9	Semarang	92,02	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
10	Yogyakarta	86,38	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	85,75		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan III

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	85,24	Verifikasi langsung	15-18 Juli 2025
2	Pekanbaru	89,90	<i>Remote verification</i>	21 Juli 2025
3	Ambon	90,87	<i>Remote verification</i>	7 Agustus 2025
4	Denpasar	86,57	<i>Remote verification</i>	14 Agustus 2025
5	Pontianak	84,51	<i>Remote verification</i>	21 Agustus 2025
6	Balikpapan	92,38	<i>Remote verification</i>	27 Agustus 2025
	Rata-Rata	88,24		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan IV

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bengkulu	84,10	<i>Remote verification</i>	23 Oktober 2025
2	Padang	83,33	<i>Remote verification</i>	13 November 2025
	Rata-Rata	83,72		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :

Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(89,91+85,75+88,24+83,72) / 4 = 86,91$.

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Lampiran III. Capaian Penerapan - Lembaga Inspeksi
 Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/II/2026
 Tanggal : 7 Januari 2026

CAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LEMBAGA INSPEKSI

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan I

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Lampung	93,22	<i>Remote verification</i>	20 Maret 2025
	Rata-Rata	93,22		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan II

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Balikpapan	93,65	<i>Remote verification</i>	24 April 2025
2	Cirebon	91,00	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
3	Kendari	81,36	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
4	Kupang	88,52	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
5	Manado	92,22	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
6	Merak	88,89	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
7	Surabaya II	91,30	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Yogyakarta	91,52	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	89,81		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan III

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	79,44	Verifikasi angsung	15-18 Juli 2025
2	Banjarmasin	92,09	<i>Remote erification</i>	24 Juli 2025
3	Mataram	84,18	<i>Remote erification</i>	31 Juli 2025
4	Jayapura	90,16	<i>Remote erification</i>	13 Agustus 2025
5	Padang	86,78	<i>Remote erification</i>	21 Agustus 2025
6	Makassar	90,96	<i>Remote erification</i>	26 Agustus 2025
7	Palembang	91,00	<i>Remote erification</i>	28 Agustus 2025
8	Palangkaraya	84,48	<i>Remote erification</i>	11 September 2025
9	Pekanbaru	89,42	<i>Remote erification</i>	16 September 2025
10	Mamuju	76,84	<i>Remote erification</i>	24 September 2025
	Rata-Rata	86,53		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan IV

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Sorong	89,44	<i>Remote verification</i>	11 November 2025
	Rata-Rata	89,44		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :

Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(93,22+89,81+86,53+89,44) / 4 = 89,75$

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu
sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

7 Januari 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengisian capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Target capaian indikator kinerja utama tahun 2025 untuk Sistem Manajemen Mutu Laboratorium adalah 75 (nilai) dan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi adalah 75 (nilai).
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan I adalah sebesar 89,91 (119,88%); nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 85,75 (114,33%); nilai capaian Triwulan III adalah sebesar 88,24 (117,65%); dan nilai capaian Triwulan IV adalah sebesar 83,72 (111,63%). Capaian indikator kinerja utama sampai dengan triwulan IV (capaian tahunan) tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebesar 86,91 (115,88%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran II.
3. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan I adalah sebesar 93,22 (124,29%); nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 89,81 (119,75%); nilai capaian Triwulan III adalah sebesar 86,53 (115,37%); dan nilai capaian Triwulan IV adalah sebesar 89,44 (119,25%). Capaian indikator kinerja utama sampai dengan triwulan IV (capaian tahunan) tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebesar 89,75 (119,67%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran III.

4. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I. Daftar Tujuan Surat
Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Jakarta I
2. Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Makassar
3. Plt. Kepala BUSPMHKP
4. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jakarta II
5. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya I
6. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya II
7. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Semarang
8. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Denpasar
9. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Mataram
10. Kepala Balai BPPMHKP Lampung
11. Kepala Balai BPPMHKP Medan I
12. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tanjung Pinang
13. Kepala Balai BPPMHKP Balikpapan
14. Kepala Balai BPPMHKP Banjarmasin
15. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Entikong
16. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tarakan
17. Kepala Balai BPPMHKP Ambon
18. Kepala Balai BPPMHKP Manado
19. Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jayapura
20. Kepala Stasiun BPPMHKP Cirebon
21. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Yogyakarta
22. Kepala Stasiun BPPMHKP Bandung
23. Kepala Stasiun BPPMHKP Merak
24. Kepala Stasiun BPPMHKP Aceh
25. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Medan II
26. Kepala Stasiun BPPMHKP Batam
27. Kepala Stasiun BPPMHKP Pekanbaru
28. Kepala Stasiun BPPMHKP Palembang

29. Kepala Stasiun BPPMHKP Jambi
30. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Padang
31. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Bengkulu
32. Kepala Stasiun BPPMHKP Pangkal Pinang
33. Kepala Stasiun BPPMHKP Bima
34. Kepala Stasiun BPPMHKP Kupang
35. Kepala Stasiun BPPMHKP Pontianak
36. Kepala Stasiun BPPMHKP Palangkaraya
37. Kepala Stasiun BPPMHKP Palu
38. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Kendari
39. Kepala Stasiun BPPMHKP Bau-bau
40. Kepala Stasiun BPPMHKP Gorontalo
41. Kepala Stasiun BPPMHKP Mamuju
42. Kepala Stasiun BPPMHKP Ternate
43. Kepala Stasiun BPPMHKP Luwuk Banggai
44. Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjung Balai Asahan
45. Kepala Stasiun BPPMHKP Tahuna
46. Kepala Stasiun BPPMHKP Merauke
47. Kepala Stasiun BPPMHKP Sorong

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

CAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan I

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Makassar	91,23	<i>Remote verification</i>	20 Maret 2025
2	Pangkalpinang	88,58	<i>Remote verification</i>	21 Maret 2025
	Rata-Rata	89,91		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan II

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Cirebon	93,89	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
2	Jakarta II	82,45	Verifikasi langsung	16-17 April 2025
3	Jambi	89,64	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
4	Kendari	76,32	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
5	Kupang	80,18	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
6	Manado	87,67	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
7	Mataram	87,84	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Merak	81,14	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
9	Semarang	92,02	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
10	Yogyakarta	86,38	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	85,75		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan III

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	85,24	Verifikasi langsung	15-18 Juli 2025
2	Pekanbaru	89,90	<i>Remote verification</i>	21 Juli 2025
3	Ambon	90,87	<i>Remote verification</i>	7 Agustus 2025
4	Denpasar	86,57	<i>Remote verification</i>	14 Agustus 2025
5	Pontianak	84,51	<i>Remote verification</i>	21 Agustus 2025
6	Balikpapan	92,38	<i>Remote verification</i>	27 Agustus 2025
	Rata-Rata	88,24		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan IV

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bengkulu	84,10	<i>Remote verification</i>	23 Oktober 2025
2	Padang	83,33	<i>Remote verification</i>	13 November 2025
	Rata-Rata	83,72		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :

Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(89,91+85,75+88,24+83,72) / 4 = 86,91$.

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Lampiran III. Capaian Penerapan - Lembaga Inspeksi
 Nomor : B.35/BPPMHKP.2/TU.210/II/2026
 Tanggal : 7 Januari 2026

CAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LEMBAGA INSPEKSI

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan I

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Lampung	93,22	<i>Remote verification</i>	20 Maret 2025
	Rata-Rata	93,22		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan II

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Balikpapan	93,65	<i>Remote verification</i>	24 April 2025
2	Cirebon	91,00	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
3	Kendari	81,36	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
4	Kupang	88,52	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
5	Manado	92,22	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
6	Merak	88,89	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
7	Surabaya II	91,30	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Yogyakarta	91,52	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	89,81		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan III

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	79,44	Verifikasi angsung	15-18 Juli 2025
2	Banjarmasin	92,09	<i>Remote erification</i>	24 Juli 2025
3	Mataram	84,18	<i>Remote erification</i>	31 Juli 2025
4	Jayapura	90,16	<i>Remote erification</i>	13 Agustus 2025
5	Padang	86,78	<i>Remote erification</i>	21 Agustus 2025
6	Makassar	90,96	<i>Remote erification</i>	26 Agustus 2025
7	Palembang	91,00	<i>Remote erification</i>	28 Agustus 2025
8	Palangkaraya	84,48	<i>Remote erification</i>	11 September 2025
9	Pekanbaru	89,42	<i>Remote erification</i>	16 September 2025
10	Mamuju	76,84	<i>Remote erification</i>	24 September 2025
	Rata-Rata	86,53		

Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan IV

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Sorong	89,44	<i>Remote verification</i>	11 November 2025
	Rata-Rata	89,44		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar :

Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV = $(93,22+89,81+86,53+89,44) / 4 = 89,75$

Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	93.04	99.66	0.00	0.00	99.28	100.00	78.82	80%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	19.93	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	96.52		99.47				100.00				

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfil Like Watung', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Marfil Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026	12 Januari 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah **95,88** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,84** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun KIPM Palangkaraya.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report (Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA) (87,61).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	96,36
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,02
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,99
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,02
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,06
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	95,31
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,51
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,14
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,49

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala UPT dan Tim Pelayanan Publik BPPMHKP se-Indonesia. Pencapaian nilai SKM tertinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan buah sinergi dan kerja keras kolektif saudara sebagai garda terdepan. Layanan transparan, cepat, dan profesional yang konsisten dijalankan telah berhasil memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi kita. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak/Ibu dalam menjaga marwah pelayanan publik BPPMHKP.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	INDEKS SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun KIPM Batam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	18	Online
2	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	22	Online
3	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	9	Online
4	Stasiun KIPM Ternate	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	4,00	A	Sangat Baik	48	Online
5	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,73	99,73	99,80	99,60	99,73	99,73	99,66	99,80	99,80	99,73	3,99	A	Sangat Baik	373	Online
6	Balai KIPM Tarakan	99,39	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39	100,00	100,00	99,39	99,66	3,99	A	Sangat Baik	41	Online
7	Balai KIPM Banjarmasin	99,53	99,53	99,21	99,53	99,84	99,53	99,69	99,84	99,84	99,62	3,98	A	Sangat Baik	159	Online
8	Stasiun KIPM Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00	100,00	100,00	99,54	3,98	A	Sangat Baik	6	Online
9	Balai KIPM Ambon	98,61	98,89	98,89	99,17	99,17	98,33	99,17	99,44	98,89	98,95	3,96	A	Sangat Baik	90	Online
10	Balai KIPM Mataram	98,61	99,07	99,07	98,61	99,07	98,61	97,69	98,15	98,61	98,61	3,94	A	Sangat Baik	54	Online
11	Balai Besar KIPM Makassar	98,60	98,55	98,32	98,32	98,43	98,27	98,32	98,49	98,32	98,40	3,94	A	Sangat Baik	447	Online
12	Balai KIPM Tanjung Pinang	99,01	97,52	98,51	99,34	97,35	97,85	97,19	99,34	98,68	98,31	3,93	A	Sangat Baik	151	Online

13	Stasiun KIPM Kendari	97,73	98,48	97,73	97,73	97,73	97,73	98,48	97,73	99,24	98,06	3,92	A	Sangat Baik	33	Online
14	Stasiun KIPM Pontianak	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	95,90	95,49	95,49	95,08	97,95	3,92	A	Sangat Baik	61	Online
15	Pusat Manajemen Mutu	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	3,92	A	Sangat Baik	8	Online
16	Balai KIPM Entikong	98,17	97,87	97,87	98,78	96,95	96,95	97,26	98,17	97,26	97,70	3,91	A	Sangat Baik	82	Online
17	Balai KIPM Jayapura	97,92	93,75	100,00	97,92	100,00	100,00	95,83	97,92	95,83	97,69	3,91	A	Sangat Baik	12	Online
18	Stasiun KIPM Merak	97,92	96,53	97,22	97,92	97,92	97,92	97,22	97,92	97,22	97,53	3,90	A	Sangat Baik	36	Online
19	Stasiun KIPM Bima	96,15	100,00	96,15	98,08	98,08	98,08	96,15	98,08	96,15	97,44	3,90	A	Sangat Baik	13	Online
20	Stasiun KIPM Tahuna	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	3,89	A	Sangat Baik	9	Online
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,31	97,04	97,04	97,04	97,04	97,04	96,77	97,85	97,58	97,19	3,89	A	Sangat Baik	93	Online
22	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	98,17	96,34	96,95	95,73	97,56	96,95	97,56	98,17	96,34	97,09	3,88	A	Sangat Baik	41	Online
23	Stasiun KIPM Sorong	93,42	95,39	95,39	94,74	97,37	99,34	100,00	99,34	98,68	97,08	3,88	A	Sangat Baik	38	Online
24	Balai KIPM Denpasar	96,60	96,25	96,74	96,88	96,60	95,96	96,25	96,46	96,67	96,49	3,86	A	Sangat Baik	353	Online
25	Balai KIPM Surabaya II	97,75	97,50	96,75	97,75	97,50	96,50	97,25	97,00	90,00	96,44	3,86	A	Sangat Baik	100	Online
26	Stasiun KIPM Aceh	98,44	96,88	96,88	93,75	95,31	96,88	95,31	98,44	95,31	96,35	3,85	A	Sangat Baik	16	Online
27	Balai KIPM Jakarta II	96,63	97,12	96,63	96,15	96,15	95,19	96,15	96,15	95,19	96,15	3,85	A	Sangat Baik	52	Online

28	Balai KIPM Balikpapan	95,40	95,40	97,00	95,00	96,20	92,80	94,60	97,20	97,00	95,62	3,82	A	Sangat Baik	125	Online
29	Stasiun KIPM Bau-Bau	95,97	97,58	95,16	94,35	94,35	93,55	95,97	93,55	94,35	94,98	3,80	A	Sangat Baik	31	Online
30	Stasiun KIPM Jambi	96,25	91,25	95,00	97,50	95,00	92,50	94,38	95,63	95,63	94,79	3,79	A	Sangat Baik	40	Online
31	Stasiun KIPM Mamuju	94,44	94,44	94,44	97,22	94,44	91,67	91,67	94,44	94,44	94,14	3,77	A	Sangat Baik	9	Online
32	Stasiun KIPM Medan II	95,59	94,75	93,91	94,12	93,49	93,91	93,28	93,70	93,28	94,00	3,76	A	Sangat Baik	119	Online
33	Stasiun KIPM Padang	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	87,50	93,52	3,74	A	Sangat Baik	6	Online
34	Stasiun KIPM Yogyakarta	95,59	94,85	89,71	93,38	94,85	92,65	92,65	94,12	93,38	93,46	3,74	A	Sangat Baik	34	Online
35	Stasiun KIPM Palembang	96,00	96,00	92,00	94,00	91,00	89,00	94,00	95,00	94,00	93,44	3,74	A	Sangat Baik	25	Online
36	Balai KIPM Medan I	95,10	96,08	94,12	93,63	95,10	93,14	94,12	92,65	85,29	93,25	3,73	A	Sangat Baik	51	Online
37	Stasiun KIPM Bandung	94,35	93,55	91,94	92,74	93,55	93,55	91,13	92,74	91,94	92,83	3,71	A	Sangat Baik	31	Online
38	Balai KIPM Semarang	94,21	91,05	93,16	94,74	94,47	88,68	88,68	93,16	92,11	92,25	3,69	A	Sangat Baik	95	Online
39	Balai KIPM Manado	91,30	91,85	91,30	92,39	92,93	91,30	92,93	94,02	91,30	92,15	3,69	A	Sangat Baik	46	Online
40	Balai KIPM Lampung	93,18	93,18	93,18	89,39	91,67	93,18	90,91	94,70	89,39	92,09	3,68	A	Sangat Baik	33	Online
41	Stasiun KIPM Kupang	91,31	91,31	91,49	90,43	91,67	91,31	91,13	91,67	92,20	91,39	3,66	A	Sangat Baik	141	Online
42	Balai Besar KIPM Jakarta I	91,67	91,44	91,44	90,28	91,90	90,74	90,97	90,51	91,20	91,13	3,65	A	Sangat Baik	108	Online

43	Stasiun KIPM Cirebon	91,79	91,60	91,03	91,79	90,65	90,08	89,69	90,84	90,27	90,86	3,63	A	Sangat Baik	131	Online
44	Balai Uji Standar KIPM	91,03	91,03	90,76	91,03	90,49	88,86	90,49	90,22	88,86	90,31	3,61	A	Sangat Baik	92	Online
45	Balai KIPM Surabaya I	92,31	90,60	90,17	91,67	90,38	88,25	89,10	90,81	89,32	90,29	3,61	A	Sangat Baik	117	Online
46	Stasiun KIPM Bengkulu	90,97	90,28	89,58	87,50	90,97	90,28	89,58	91,67	89,58	90,05	3,60	A	Sangat Baik	36	Online
47	Stasiun KIPM Palangkaraya	91,67	90,48	90,48	87,50	88,69	85,12	86,90	88,69	88,69	88,69	3,55	A	Sangat Baik	42	Online
48	Stasiun KIPM Gorontalo	88,48	88,20	88,20	88,20	88,48	88,76	88,20	88,20	88,20	88,33	3,53	A	Sangat Baik	89	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	6	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	95,83	91,67	93,52	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2506	97,39	97,25	97,40	97,37	97,29	96,69	96,80	97,33	96,93	97,16	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	15	96,67	95,00	96,67	93,33	93,33	96,67	93,33	96,67	91,67	94,81	A	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	129	97,29	97,29	95,93	96,32	96,90	96,71	97,48	97,29	96,32	96,83	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	258	95,54	94,38	93,99	93,90	94,28	92,83	93,99	95,06	94,19	94,24	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	121	94,21	93,18	92,77	93,39	92,77	91,94	91,74	93,18	92,56	92,86	A	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	8	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	398	93,72	93,53	92,78	93,03	93,09	92,15	92,15	93,15	91,65	92,80	A	Sangat Baik
9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	250	92,60	91,40	91,80	92,00	92,70	91,40	91,30	92,20	91,10	91,83	A	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	88,46	86,54	88,46	88,46	86,54	86,54	88,46	88,46	86,54	87,61	B	Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	12	91,67	89,58	89,58	85,42	89,58	85,42	89,58	83,33	83,33	87,50	B	Baik
12	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	47	94,15	93,09	93,62	94,15	94,68	92,02	93,09	94,15	94,15	93,68	A	Sangat Baik

13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	99,07	A	Sangat Baik
Seluruh Layanan BPPMHKP		3766	96,36	96,02	95,99	96,02	96,06	95,31	95,51	96,14	95,49	95,88	A	Sangat Baik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan berdas, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).
3. Capaian IK NKPA level 0 (KKP) masih dalam proses koordinasi perbaikan system aplikasi Monev Kemenkeu sehubungan tidak dapat dilakukan penginputan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada aplikasi SAKTI dengan keterangan error.
4. Penyampaian capaian IK NKPA level 0 (KKP) paling lambat kami sampaikan tanggal 15 Januari 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

**Tembusan:
Sekretaris Jenderal**

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 138/SJ.2/RC.610/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) PER ESELON I
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

NK Perencanaan Eselon I									
Tampilkan 10 dari 10									
No.	Kode UBL	UBL	NK Perencanaan Anggaran	Strukturisasi		Efisiensi		Efisiensi SDA	
				RUP	CRD	Penggunaan SDA			
1	01	Saluran Air	11.00	100.00	10.00	10.00		10.00	
2	02	Saluran Air	11.00	100.00	10.00	10.00		10.00	
3	03	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
4	04	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
5	05	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
6	06	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
7	07	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
8	08	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	
9	09	Saluran Air	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ++	Kode Satuan Kerja ++	Satuan Kerja ++	NK Perencanaan Anggaran ++	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ++	Penggunaan SBK ++	Efisiensi SBK ++	
1	032.01.032001	BINDO UMUM DAN PEMSAJAH BARANG/JASA	95,63	100,00	77,78	85,70	
2	032.01.032004	BALAI PENYELIDIAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
3	032.01.000006	LEMBAGA PEMODELOK MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	79,70	87,93	100,00	25,00	
4	032.01.000005	DINAS PERTANAHAN, PANGKON, KELAUTAN DAN PERTAMBAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	032.01.000008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	032.01.000007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	032.01.000003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	032.01.000023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	032.01.000030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROEC ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	032.01.000031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	032.01.000032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	032.01.000033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	032.01.000034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	032.01.000035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	032.01.000036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	032.01.000037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	032.01.000038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	032.01.000039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	032.01.000040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	032.01.000041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	032.01.000042	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	032.01.000043	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	032.01.000044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	032.01.000045	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	032.01.000046	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	032.01.000047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	032.01.000048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	032.01.000049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	032.01.000050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BONGOLULE	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	032.01.000051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	032.01.000052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	032.01.000053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	032.01.000054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	032.01.000055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	032.01.000056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	032.01.000057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	032.01.000058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	032.01.000059	DINAS PERTAMBAN, PANGKON, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	032.01.000060	DINAS PERTAMBAN, PANGKON DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNJUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	032.01.000061	DINAS PANGKON, PERTAMBAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	032.01.000062	DINAS PANGKON, PERTAMBAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	RA Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RI	Penggunaan SDA	Effisiensi SDA	
1	INSPEKTORAT JENDERAL	INSPEKTORAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ↑	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	001.03.010002	DINAS KELAUTAN DAN PERTAMBAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	001.03.010173	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
3	001.03.010103	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001.03.010007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALABARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
5	001.03.010130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
6	001.03.010143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001.03.010136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	001.03.010142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	001.03.010010	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NIAS	100,00	100,00	100,00	100,00
10	001.03.100121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBU	100,00	100,00	100,00	100,00
11	001.03.110114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	001.03.120123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
13	001.03.130138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
14	001.03.140134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
15	001.03.150119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	001.03.160139	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	001.03.170113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
18	001.03.180103	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	001.03.190127	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
20	001.03.200117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
21	001.03.210009	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	001.03.220110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00
23	001.03.230720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	81,52	91,13	95,24	24,30
24	001.03.230120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVS. BANGSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
25	001.03.230106	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGMUTU	97,00	100,00	100,00	80,00
26	001.03.230105	BALAI BESAR PENGANGKAPAN IKAN	97,00	100,00	100,00	80,00
27	001.03.230171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PERALINGAN	94,25	100,00	80,00	75,00
28	001.03.230108	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUMBAWANG	97,00	100,00	100,00	80,00
29	001.03.230221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TELUK BANGS	97,00	100,00	100,00	80,00
30	001.03.230235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BANGS	94,25	100,00	80,00	75,00
31	001.03.230001	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	94,53	100,00	100,00	63,55
32	001.03.240100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVS. BANGSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
33	001.03.250107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROPINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	001.03.260120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	001.03.260111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALINDI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	001.03.260001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
37	001.03.300170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVS. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
38	001.03.310710	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEMANGKANG	96,25	100,00	100,00	75,00
39	001.03.310000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001.03.310007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN NIAS	100,00	100,00	100,00	100,00
41	001.03.310000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	001.03.340100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVS. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
43	001.03.417000	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SELATAN	92,92	100,00	100,00	52,80
44	001.03.417001	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERATE	88,14	100,00	50,00	54,25
45	001.03.417070	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	94,93	100,00	100,00	66,20

46	632.03.427003	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA BRONDONG	90,50	100,00	80,00	50,00
47	632.03.518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	93,57	100,00	100,00	57,15
48	632.03.531409	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SUNGUR	95,00	100,00	100,00	66,65
49	632.03.537613	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NISAN TACHIMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
50	632.03.537906	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	93,57	100,00	100,00	57,15
51	632.03.900703	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PELABUHAN RAPI	97,00	100,00	100,00	80,00
52	632.03.989801	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA SIBOLGA	94,25	100,00	80,00	75,00
53	632.03.922403	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA AMBON	96,67	100,00	66,67	100,00
54	632.03.922476	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA TUAL	86,57	92,31	83,33	60,00
55	632.03.922403	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA RIJAUANAN	97,00	100,00	100,00	80,00
56	632.03.632330	DIRAAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROSISI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	632.03.632903	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PONDAMBEUNAN	91,41	100,00	100,00	42,70
58	632.03.632707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	90,50	100,00	80,00	50,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. +	Kode Satuan Kerja +	Satuan Kerja +	RK Perencanaan Anggaran +	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO +	Penggunaan SBK +	Efisiensi SBK +	
1	001.04.110900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	001.04.120010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	001.04.120100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	001.04.140000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	001.04.150100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	001.04.160100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KANGGARA RIOTI KAPULANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	001.04.170010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	001.04.180100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	001.04.190100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001.04.200100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JARAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001.04.210010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001.04.220100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	001.04.240100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	001.04.250100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	001.04.100100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	001.04.110100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	001.04.100100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	001.04.100100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	001.04.100100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	001.04.210010	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI HALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	001.04.220100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	001.04.230010	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUMBA SELAM	91,76	96,93	83,33	71,50	
24	001.04.230100	BALAI SARAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUMBAH	95,33	100,00	83,33	80,00	
25	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. ROTA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	001.04.230100	BALAI SARAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JERANG	95,00	100,00	50,00	100,00	
27	001.04.230100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. ROTA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DASARA PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI HALUO UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SORONG	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KAPULANAN BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	001.04.410000	BALAI SARAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00	100,00	60,00	
38	001.04.400000	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLOK) KAWANAN	95,33	100,00	83,33	80,00	
39	001.04.400000	BALAI PRODUKSI IDEAL USANG LINGGUL DAN KEDIRANAN KAWANAN	96,32	100,00	100,00	70,45	
40	001.04.400010	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATULU	97,30	100,00	75,00	100,00	
41	001.04.400020	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SITUNGKED	97,30	100,00	75,00	100,00	
42	001.04.400030	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR USANG BATES	95,00	100,00	50,00	100,00	
43	001.04.400040	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT SATAN	96,56	100,00	100,00	77,05	
44	001.04.400050	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR KAWANAN	94,25	100,00	80,00	75,00	
45	001.04.400060	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TUBALAN	74,39	99,98	0,00	0,00	
46	001.04.400070	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT ANGIN	91,84	98,56	66,67	75,00	
47	001.04.400080	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LINGGUL	97,00	100,00	100,00	80,00	
48	001.04.400090	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR LINGGULAN KAWANAN	72,30	96,67	0,00	0,00	
49	001.04.410000	STUDIEN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00	75,00	56,05	
50	001.04.400000	DINAS PERTANIAN, PANGSA, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	001.04.400000	DINAS PERTANIAN, PANGSA, DAN PERIKANAN PAPUA PELLENGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	001.04.400000	DINAS PANGSA, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	001.04.400000	DINAS PANGSA, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	001.04.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1.	033.05.430000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	033.05.431000	STASIS POKP CILACAP	90,09	100,00	90,91	40,00	
3.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	033.05.440000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	033.05.500100	PANGKALAN POKP LAMPUNG	88,76	100,00	72,73	43,25	
6.	033.05.500000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	033.05.110000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	033.05.120000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	033.05.210000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	033.05.100000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	033.05.210000	STASIS POKP TANGGARA	94,16	94,13	84,62	34,05	
12.	033.05.110000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	033.05.120000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	033.05.100000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	033.05.210000	STASIS POKP AMBON	89,50	100,00	100,00	30,00	
16.	033.05.110000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	033.05.300100	PANGKALAN POKP BENGK	89,77	100,00	72,73	50,00	
18.	033.05.210000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	033.05.400100	STASIS POKP KUPANG	89,62	100,00	81,67	36,35	
20.	033.05.110000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	033.05.300100	STASIS POKP BAKI	89,77	100,00	72,73	50,00	
22.	033.05.110000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI NAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	033.05.300100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	033.05.300000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	033.05.110000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	033.05.300100	PANGKALAN POKP BAKI	89,76	98,19	81,67	36,35	
27.	033.05.210000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	033.05.110000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NAPIA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	033.05.300100	STASIS POKP TANGGARA	89,66	100,00	81,67	36,60	
30.	033.05.440100	PANGKALAN PENGAWASAN SDAK JAKARTA	92,62	99,81	100,00	33,75	
31.	033.05.440100	PANGKALAN PENGAWASAN SDAK SITUNG	89,78	99,37	75,00	45,00	
32.	033.05.440100	STASIS PENGAWASAN SDAK BELANGA	90,63	100,00	83,33	50,00	
33.	033.05.440100	STASIS PENGAWASAN SDAK PONTIANAK	89,45	100,00	80,00	42,70	
34.	033.05.440100	PANGKALAN PENGAWASAN SDAK TULI	91,36	100,00	100,00	42,40	
35.	033.05.440100	DIREKTORAT DIREKTORAT JENDRAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,58	100,00	80,95	43,25	
36.	033.05.400000	DINAS KETANANAN, HUKUM, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN SARAWAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	033.05.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	022.06.000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	022.06.000001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
48	022.06.000002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NALAMUTAN SARU	0,00	0,00	0,00	0,00
49	022.06.000003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NALAMUTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
50	022.06.000004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NALAMUTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
51	022.06.000005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NALAMUTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
52	022.06.000006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
53	022.06.000007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
54	022.06.000008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
55	022.06.000009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	022.06.000010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
57	022.06.000011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
58	022.06.000012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
59	022.06.000013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
60	022.06.000014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (MABAH PROVINSI) PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	022.06.000015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKALU	0,00	0,00	0,00	0,00
62	022.06.000016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALIKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	022.06.000017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
64	022.06.000018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
65	022.06.000019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	022.06.000020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
67	022.06.000021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
68	022.06.000022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
69	022.06.000023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RD	Penggunaan SBK	Effisiensi SBK	
1	002.06.407000	BALAI BELAN PENGUATAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPPKP)	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	002.06.402001	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,23	100,00	100,00	61,55	
3	002.06.400000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROEC ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BATAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JABAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RANGGAI MELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SORONGALU	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN MALU	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KKP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ¹⁾	Kode Satuan Kerja ²⁾	Satuan Kerja ³⁾	NK Perencanaan Anggaran ⁴⁾	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ⁵⁾	Penggunaan SBK ⁶⁾	Efisiensi SBK ⁷⁾	
1	001.07.200140	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DATA PESUDIR DAN LAUT BERANG	98,33	100,00	83,33	100,00	
2	001.07.477419	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDATA PESUDIR DAN LAUT DEMPASAR	97,86	100,00	100,00	85,70	
3	001.07.477420	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDATA PESUDIR DAN LAUT PONTIANAK	98,57	100,00	85,71	100,00	
4	001.07.477431	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDATA PESUDIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	001.07.477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDATA PESUDIR DAN LAUT SORONG	98,57	100,00	85,71	100,00	
6	001.07.477454	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PERKAWASU	99,24	100,00	100,00	94,95	
7	001.07.400346	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDATA PESUDIR DAN LAUT (BSPPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00	
8	001.07.400351	SALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (SKKPN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	001.07.422140	SEKRETARIAT DINAS PENGELOLAAN SELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20	
10	001.07.801046	SINAS KETANANAN RUMAH, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001.07.801047	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001.07.801048	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001.07.801049	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	001.07.801050	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	001.07.801051	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KABUPATEN ALYH DARUSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	001.07.801052	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	001.07.801053	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	001.07.801054	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANG	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	001.07.801055	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	001.07.801056	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	001.07.801057	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	001.07.801058	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	001.07.801059	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	001.07.801060	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	001.07.801061	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	001.07.801062	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	001.07.801063	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	001.07.801064	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	001.07.801065	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	001.07.801066	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	001.07.801067	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	001.07.801068	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	001.07.801069	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	001.07.801070	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAERAH) PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	001.07.801071	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	001.07.801072	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	001.07.801073	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	001.07.801074	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	001.07.801075	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	001.07.801076	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	001.07.801077	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	001.07.801078	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	001.07.801079	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP BADAN PENYULUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PERIKANAN KKP DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ⁺⁺	Kode Satuan Kerja ⁺⁺	Satuan Kerja ⁺⁺	NK Perencanaan Anggaran ⁺⁺	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ⁺⁺	Penggunaan SBK ⁺⁺	Efisiensi SBK ⁺⁺	
1	002.03.037373	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00	
2	002.03.038018	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	002.03.038741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	002.03.038795	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	002.03.038793	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGU	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	002.03.038189	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	002.03.038365	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	002.03.003385	INAGEM KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	84,42	99,22	100,00	0,00	
9	002.03.403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KEKERENTANAN PESIR	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	002.03.403829	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	002.03.403811	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	002.03.403812	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	002.03.403813	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	002.03.403814	BALAI RISET PERULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	002.03.403819	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	002.03.403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	002.03.403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	002.03.403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	002.03.403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	002.03.403831	BALAI RISET PENYULUHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	002.03.403833	LOKA RISET BUDIDAYA BIMPUDI LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	002.03.403834	LOKA RISET WERAKTASI PENGOLAHAN IKAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	002.03.403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BENTUKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	002.03.403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	002.03.403817	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	92,50	100,00	100,00	50,00	
26	002.03.403818	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	002.03.403819	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN BOME	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	002.03.403873	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMAI (POLTER KP SUMAI)	90,00	100,00	100,00	33,35	
29	002.03.403879	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKABARAN (POLTER KP PANGKABARAN)	75,00	100,00	0,00	0,00	
30	002.03.427511	POLITERMIN BILI USHA PERIKANAN (POLTER ALP) JABART	92,50	100,00	100,00	50,00	
31	002.03.437953	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	002.03.437973	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH PADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	002.03.437982	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00	
34	002.03.437618	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH MAJEMBU	92,50	100,00	100,00	50,00	
35	002.03.437630	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	002.03.448613	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTER KP JEMBRANA)	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	002.03.432955	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	002.03.439402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50	
39	002.03.434146	POLITERMIN KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	75,00	100,00	0,00	0,00	
40	002.03.003886	SEDLAH USHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
41	002.03.003826	BALAI PENGIDUKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDU	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	002.03.004026	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	002.13.427043	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA	95,00	100,00	50,00	100,00	
2	002.13.427051	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MESAR I	92,50	100,00	100,00	50,00	
3	002.13.427096	BALAI BESAK KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	002.13.427024	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	002.13.427048	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAS	97,23	96,30	100,00	100,00	
6	002.13.440007	BERBENTUK BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45	
7	002.13.387433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00	
8	002.13.387433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	002.13.387461	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	002.13.387336	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00	
11	002.13.387610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKAPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
12	002.13.387631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00	
13	002.13.387604	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00	
14	002.13.387706	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	002.13.387613	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	002.13.348061	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	002.13.348061	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN RENGAS	95,00	100,00	100,00	66,65	
18	002.13.348072	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANGERANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	002.13.348088	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	002.13.348093	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAN JARASIN	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	002.13.348061	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	002.13.348016	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25	
23	002.13.348023	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN REMBOKU	92,50	100,00	100,00	50,00	
24	002.13.348036	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	002.13.348037	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	002.13.348061	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	002.13.348079	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	002.13.348061	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA B	92,51	96,68	50,00	100,00	
29	002.13.348066	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN	95,00	100,00	50,00	100,00	
30	002.13.348069	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	002.13.348104	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUPE	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	002.13.348111	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	93,16	90,91	100,00	100,00	
33	002.13.348109	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SONDYAKARYA	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	002.13.348132	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CENBON	92,50	100,00	100,00	50,00	
35	002.13.348109	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	002.13.348167	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERATE	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	002.13.363087	BALAI ILA STANAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP
Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	C	d	E
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

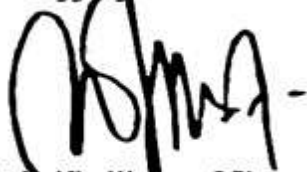


Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

IP ASN 2025													
1	TELKOM SELATAN 1 (TELSEL1)	28	2348	82.30%	9428	79.7%	25	8232%	0	100%	8436	18603	
2	TELKOM SELATAN 2 (TELSEL2)	27	2523	80.20%	9389	94.73%	26	8232%	0	100%	8732	18603	
3	TELKOM SELATAN 3 (TELSEL3)	26	2186	818.0%	9486	88.9%	26	8232%	0	100%	8861	18603	
4	TELKOM SELATAN 4 (TELSEL4)	25	2313	82.48%	9177	79.47%	26	8535%	0	100%	8489	18603	
5	TELKOM SELATAN 5 (TELSEL5)	24	2217	90.8%	96	875%	25,27	84.20%	0	100%	8737	18603	
6	TELKOM SELATAN 6 (TELSEL6)	23	2335	79.4%	9300	72.81%	26	8232%	0	100%	8236	18603	
7	TELKOM SELATAN 7 (TELSEL7)	22	2252	81.60%	9354	83.85%	26	8232%	0	100%	8645	18603	
8	TELKOM SELATAN 8 (TELSEL8)	21	2236	82.66%	96	875%	26	8232%	0	100%	8838	18603	
9	TELKOM SELATAN 9 (TELSEL9)	20	2184	82.76%	9445	88.8%	26	8232%	0	100%	8639	18603	
10	TELKOM SELATAN 10 (TELSEL10)	19	227	92.1%	97	770.6%	26	8232%	0	100%	86	18603	
11	TELKOM SELATAN 11 (TELSEL11)	18	2381	84.41%	97	770.6%	238	86.7%	0	100%	8522	18603	
12	TELKOM SELATAN 12 (TELSEL12)	17	2505	82.2%	9454	86.55%	26	8535%	0	100%	8538	18603	
13	TELKOM SELATAN 13 (TELSEL13)	16	2419	96.68%	92.85	81.7%	26	8535%	0	100%	8585	18603	
14	TELKOM SELATAN 14 (TELSEL14)	15	221	90%	9636	71.8%	26	8232%	470	85.8%	9104	18603	

Penanggung Jawab IKU



Marfin Like Watung, S.Pi
NIP : 19770325198032003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/II/2026 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87.55	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM TJ. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	BKIPM DENPASAR	27	24	12.6	21	84.6	A
51	BKIPM JAYAPURA	20.7	20.7	12	15.5	68.9	B

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥86 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target (**≤86 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9,069,898,000	-	9,069,898,000			9,069,898,000	9,069,898,000	0	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	422,159,781,996	14,006,635,000	436,166,416,996			344,953,134,996	344,953,134,996	91,213,282,000	126.44%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,526,827,000		3,526,827,000			3,526,827,000	3,526,827,000	0	100.00%
TOTAL		434,756,506,996	14,006,635,000	448,763,141,996	-	-		357,549,859,996	91,213,282,000	108.81%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 91.19%	

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	3,868,642,000	-	3,868,642,000			3,868,642,000	3,868,642,000	0	100.00%
TOTAL		3,868,642,000	-	3,868,642,000	-	-		3,868,642,000	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,654,763,000	450,642,000	5,105,405,000		109,857,000	4,995,548,000	5,105,405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,500,368,000	1,726,822,000	4,227,190,000		173,053,000	4,054,137,000	4,227,190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,299,090,000	-	6,299,090,000		208,227,000	6,090,863,000	6,299,090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	5,026,187,000	-	5,026,187,000		216,547,000	4,809,640,000	5,026,187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463,513,809,000	-	463,513,809,000		457,069,402,000	6,444,407,000	463,513,809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	4,000,680,000	-	4,000,680,000		269,268,000	3,731,412,000	4,000,680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3,066,333,000	-	3,066,333,000		107,070,000	2,959,263,000	3,066,333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,391,089,000	-	4,391,089,000		686,480,000	3,704,609,000	4,391,089,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,338,592,000	-	2,338,592,000		44,900,000	2,293,692,000	2,338,592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,160,369,582,000	-	1,160,369,582,000		1,156,224,800,000	4,144,782,000	1,160,369,582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	3,096,535,000	-	3,096,535,000		143,086,000	2,953,449,000	3,096,535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,174,331,000	2,026,728,000	4,201,059,000		149,001,000	4,052,058,000	4,201,059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	2,103,023,000	6,400,000	2,109,423,000		7,744,000	2,101,679,000	2,109,423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,017,529,000	2,082,335,000	3,099,864,000		201,385,000	2,898,479,000	3,099,864,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,871,854,000	-	4,871,854,000		611,181,000	4,260,673,000	4,871,854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3,309,753,000	51,637,000	3,361,390,000		40,946,000	3,320,444,000	3,361,390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,956,661,000	-	2,956,661,000		56,249,000	2,900,412,000	2,956,661,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,045,920,000	2,346,994,000	5,392,914,000		444,154,000	4,948,760,000	5,392,914,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,243,950,000	31,000,000	61,274,950,000		55,630,617,000	5,644,333,000	61,274,950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000		0	2,358,509,000	2,358,509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,382,333,600	-	6,382,333,600		548,134,000	5,834,199,600	6,382,333,600	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38,627,180,000	-	38,627,180,000		31,472,039,000	7,155,141,000	38,627,180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20,507,865,000	-	20,507,865,000		3,614,615,000	16,893,250,000	20,507,865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,259,136,398,836	16,790,025,164	1,275,926,424,000		1,252,038,840,210	23,887,583,790	1,275,926,424,000	0	100.00%
TOTAL		3,066,992,335,436	25,512,583,164	3,092,504,918,600	-	2,960,067,595,210	132,437,323,390	3,092,504,918,600	-	100.0000%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	14,153,419,615	118,921,000	14,272,340,615		6,523,696,615	7,748,644,000	14,272,340,615	0	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	23,779,406,000	-	23,779,406,000		18,389,599,000	5,389,807,000	23,779,406,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	14,509,226,000	1,101,106,000	15,610,332,000		11,268,723,000	4,341,609,000	15,610,332,000	0	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	42,758,045,000	11,655,239,000	54,413,284,000		24,328,660,000	30,084,624,000	54,413,284,000	0	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	4,388,427,000	-	4,388,427,000		1,128,953,000	3,259,474,000	4,388,427,000	0	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	17,324,561,000	7,151,046,000	24,475,607,000		5,342,752,000	19,132,855,000	24,475,607,000	0	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	10,819,324,000	976,321,000	11,795,645,000		6,766,620,000	5,029,025,000	11,795,645,000	0	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,244,294,000	-	9,244,294,000		5,564,366,000	3,679,928,000	9,244,294,000	0	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	6,885,546,000	3,379,211,000	10,264,757,000		7,134,462,000	3,130,295,000	10,264,757,000	0	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	9,742,232,000	5,638,145,000	15,380,377,000		10,457,450,000	4,922,927,000	15,380,377,000	0	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5,054,907,000	2,061,297,000	7,116,204,000		5,387,502,000	1,728,702,000	7,116,204,000	0	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	9,787,646,000	4,338,000	9,791,984,000		6,646,293,000	3,145,691,000	9,791,984,000	0	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	4,507,731,000	4,183,662,000	8,691,393,000		4,424,860,000	4,266,533,000	8,691,393,000	0	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	5,293,648,000	2,703,818,000	7,997,466,000		6,797,648,000	1,199,818,000	7,997,466,000	0	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3,761,994,000	1,942,249,000	5,704,243,000		2,157,558,000	3,546,685,000	5,704,243,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1,236,302,182,103	2,071,318,000	1,238,373,500,103		1,218,838,384,103	19,535,116,000	1,238,373,500,103	0	100.00%
TOTAL		1,418,312,588,718	42,986,671,000	1,461,299,259,718	-	1,341,157,526,718	120,141,733,000	1,461,299,259,718	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :

= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%

= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi

100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	29,445,819,000	-	29,445,819,000		25,192,451,000	4,253,368,000	29,445,819,000	0	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	12,662,396,999	-	12,662,396,999		7,770,543,000	4,891,853,999	12,662,396,999	0	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,896,368,000	-	21,896,368,000		16,792,289,000	5,104,079,000	21,896,368,000	0	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	17,612,902,000	-	17,612,902,000		13,374,397,000	4,238,505,000	17,612,902,000	0	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	19,452,293,500	-	19,452,293,500		17,312,873,500	2,139,420,000	19,452,293,500	0	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,739,797,500	-	16,739,797,500		14,367,938,500	2,371,859,000	16,739,797,500	0	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	1,202,705,796,575	-	1,202,705,796,575		1,191,786,130,000	10,919,666,575	1,202,705,796,575	0	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,929,268,000	-	14,929,268,000		11,918,715,000	3,010,553,000	14,929,268,000	0	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,169,047,000	-	18,169,047,000		15,535,927,000	2,633,120,000	18,169,047,000	0	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,104,332,000	-	9,104,332,000		7,403,801,000	1,700,531,000	9,104,332,000	0	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,355,502,000	-	9,355,502,000		7,660,581,000	1,694,921,000	9,355,502,000	0	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	6,463,175,000	-	6,463,175,000		3,524,502,000	2,938,673,000	6,463,175,000	0	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	9,899,835,000	-	9,899,835,000		8,610,962,000	1,288,873,000	9,899,835,000	0	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,415,150,000	-	8,415,150,000		7,097,827,000	1,317,323,000	8,415,150,000	0	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	7,200,324,000	-	7,200,324,000		4,931,464,000	2,268,860,000	7,200,324,000	0	100.00%
TOTAL		1,404,052,006,574	-	1,404,052,006,574	-	1,353,280,401,000	50,771,605,574	1,404,052,006,574	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumamkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumamkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi 100.00%								

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,499,025,000	-	13,499,025,000	5,947,202,000		7,551,823,000	13,499,025,000	0	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	48,583,288,281	-	48,583,288,281	36,065,535,000		12,517,753,281	48,583,288,281	0	100.00%
TOTAL		62,082,313,281	-	62,082,313,281	42,012,737,000	-	20,069,576,281	62,082,313,281	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumamkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumamkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000		1,269,824,000	1,845,939,000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-		2,534,284,000	2,534,284,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000			6,063,515,000	6,063,515,000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	114,882,000	-	114,882,000	-		114,882,000	114,882,000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630,829,000	1,492,437,000	2,123,266,000	47,589,000		2,075,677,000	2,123,266,000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,647,000	9,431,510,000	5,753,200,000		3,678,310,000	9,431,510,000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000		2,023,875,000	2,313,249,000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000		1,848,394,000	2,124,597,000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19,799,969,000	-	19,799,969,000	16,630,596,000		3,169,373,000	19,799,969,000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000			1,453,775,000	1,453,775,000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000			2,579,025,000	2,579,025,000	0	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,697,213,000	-	3,697,213,000			3,697,213,000	3,697,213,000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000			2,085,628,000	2,085,628,000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,209,000	197,855,000	7,954,064,000	1,611,115,000		6,342,949,000	7,954,064,000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,935,402,000	-	4,935,402,000	-		4,935,402,000	4,935,402,000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000			904,514,000	904,514,000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,937,000	6,215,229,000	-		6,215,229,000	6,215,229,000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,049,000	1,237,094,000	1,456,143,000			1,456,143,000	1,456,143,000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBR	1,223,254,000	74,096,000	1,297,350,000			1,297,350,000	1,297,350,000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000			925,636,000	925,636,000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,941,830,000	-	1,941,830,000			1,941,830,000	1,941,830,000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000			2,089,200,000	2,089,200,000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000		9,793,423,000	15,571,107,000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,209,869,000	-	2,209,869,000	1,086,997,000		1,122,872,000	2,209,869,000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000		3,285,152,000	4,736,172,000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,996,000		1,612,140,000	4,929,136,000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	711,207,000	1,923,054,000	2,634,261,000	1,156,133,000		1,478,128,000	2,634,261,000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044		2,534,356,600	27,426,832,644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,944,000	2,863,949,000	530,979,000		2,332,970,000	2,863,949,000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,898,000		1,217,548,000	1,438,446,000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,092,000		3,331,310,000	9,709,402,000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,852,000		1,935,671,000	8,176,523,000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000		7,484,452,000	7,486,312,000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000		1,067,307,000	1,296,505,000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,955,000	1,088,140,000	1,999,095,000	755,610,000		1,243,485,000	1,999,095,000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2,989,553,000	16,902,000	3,006,455,000	902,105,000		2,104,350,000	3,006,455,000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000			851,173,000	851,173,000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000			1,049,687,000	1,049,687,000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000		1,144,245,000	1,580,550,000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	507,390,000		1,456,527,000	1,963,917,000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000		15,167,048,464	25,694,351,464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000		133,040,000	183,690,000	0	100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,889,000	208,693,653,108	89,646,740,044	-	119,046,913,064	208,693,653,108	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN
 Note :
 = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%
 = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN
100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000		1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	181,490,000		1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000		412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000		988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000		858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000		1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-		152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000		1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN INDIKATOR	
									100.00%	



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

NO.	UNIT KERJA	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	LINK DOKUMEN	KET
1	Balai Besar KIPM Makassar	75,51	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
2	Balai KIPM Semarang	75,28	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
3	Balai KIPM Surabaya I	77,75	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
4	Balai KIPM Denpasar	74,45	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
5	Balai KIPM Manado	75,15	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
6	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I			TIDAK ADA IKU ZI
7	BALAI KIPM MEDAN I	75,2	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7oDpRtKmwi8wnPqQaOwTqo0YMeQeHc/edit?usp=sharing&ouid=111862072129151013309&rtpof=true&sd=true	
8	BALAI KIPM BALIKPAPAN	86,18	https://drive.google.com/drive/folders/1rRP6Zz5YJ3c1DFchXSd144dOLROOIZUA?usp=drive_link	
9	BALAI KIPM JAYAPURA			TIDAK KIRIM LINK
10	BALAI KIPM JAKARTA II	75,14	https://drive.google.com/drive/folders/13eh84n041Qh5kPFijWzUV9jhkaEJsx8S?usp=drive_link	
11	BALAI KIPM SURABAYA II			TIDAK ADA IKU ZI
12	BALAI KIPM MATARAM		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gc6iVgdTVnoB-LWdltqYKh3zpSC2AucK2g9ev2kICI/edit?usp=sharing	proses penilaian
13	BALAI KIPM BANJARMASIN	76,04	https://drive.google.com/drive/folders/16NR53W5am__XPkpHEtmhDEg7UT3z3TI	
14	BALAI KIPM LAMPUNG			TIDAK KIRIM LINK
15	BALAI KIPM AMBON	83,13	https://bit.ly/wbkbkipmAmbon	
16	BALAI KIPM ENTIKONG	51.79	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kLxdGGk9VX_8k9_a5pf81EmMDhK7s1ai	TIDAK ADA IKU ZI
17	BALAI KIPM TANJUNG PINANG		https://drive.google.com/drive/folders/1-HQ5ZcYDssyCnEVXxuG1m4cc9MIUaLay?usp=drive_link	proses penilaian
18	BALAI KIPM TARAkan			TIDAK KIRIM LINK
19	STASIUN KIPM PALEMBANG	79,81	https://drive.google.com/drive/folders/1tnghynyQGRhXiUipx7FeJbaSGWdVgRDD?usp=drive_link	
20	STASIUN KIPM BANDUNG	82,34	https://drive.google.com/drive/u/5/folders/19L7np4Gsq1g0lylLLOrxnCK4ODIO2u3	TIDAK ADA IKU ZI
21	STASIUN KIPM MERAUKE	75,94	https://drive.google.com/drive/folders/10hAXb8QCte7KfSpKpn1SoaUroWqTX6j4	
22	STASIUN KIPM PONTIANAK	76,46	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yOuxJ5On6Fm5fLMcoSuvlDdg73zyI0uxwtlCoKWZVI/edit?usp=sharing	
23	STASIUN KIPM KENDARI	75,95	https://drive.google.com/drive/folders/1kRD1szQXcz9l_gAR-lDxuHxMoi6nk3Cg?usp=sharing	
24	STASIUN KIPM BATAM	78,17	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R813lvChH6TX9grlrcCVYi3-4WBF8Gwt/edit?usp=sharing&ouid=115755447930257168810&rtpof=true&sd=true	
25	STASIUN KIPM PADANG	80,86	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ruK5m40lhluq_W0ilpiNnrgEvMiDfDCV/edit?usp=sharing&ouid=113974624934543595356&rtpof=true&sd=true	
26	STASIUN KIPM JAMBI	82,02	https://tinyurl.com/KertasKerjaLKEskipmJambi	
27	STASIUN KIPM PALU	71,08	https://drive.google.com/drive/folders/1hyaRg9FkTCPrBXmYKaZR-8VlBnYy0s_?usp=drive_link	

NO.	UNIT KERJA	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	LINK DOKUMEN	KET
28	STASIUN KIPM PALANGKARAYA	71,21	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1ZT05HeXp5_KnkSCK3pzZ0LuzWHFglr/edit?usp=drive_link&ouid=117087659432948082070&rt=poof=true&sd=true	
29	STASIUN KIPM KUPANG			TIDAK KIRIM LINK
30	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	80,8	https://drive.google.com/drive/folders/1erfJ4v-TDZYwkvTmZmBwXzgx3dm5g6kW?hl=ID	
31	STASIUN KIPM TERNATE	77,36	https://drive.google.com/drive/folders/1gAlT8dYyEXD4cmkLvSuJrQJ0Ek1EJRIC	
32	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	83,03	https://drive.google.com/drive/folders/1zg7WeOpTqhVpmw8doBh_oXuS1ISNIZ-	
33	STASIUN KIPM ACEH	86,03	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i9QqPjTHYLWCbrFGHwi65uAgiiltC-gV5ZQk7uL3iyo/edit?usp=sharing	
34	STASIUN KIPM GORONTALO		https://drive.google.com/drive/folders/108XXsLe25K9eWF6MSsq8bMQwIZes4Vk6	Proses penilaian
35	STASIUN KIPM PEKANBARU	70,74	https://linktr.ee/skipmpekanbaru	
36	STASIUN KIPM MEDAN II	75,42	https://drive.google.com/drive/folders/1pNnibbtMcdB7mRqIQBEfuLaj1vIwthpy?usp=drive_link	TIDAK ADA IKU ZI
37	STASIUN KIPM SORONG	70,21	https://drive.google.com/drive/folders/1jP891ekmj8U30oFGxv49HAtU4emA1X25?usp=drive_link	
38	STASIUN KIPM BENGKULU			TIDAK KIRIM LINK
39	STASIUN KIPM CIREBON	83,05	https://drive.google.com/drive/folders/1V4_ixYVvlgNuBojfwJ5rD5Fb5C0XUcjX?usp=drive_link	
40	STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI	38,25	https://drive.google.com/drive/folders/1jiKtgodh6mKruSipDf-Cod_E0kgMooJ9?usp=sharing	TIDAK ADA IKU ZI
41	STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN	56,67	https://drive.google.com/drive/folders/1UdEY1VnBfTWUXZIXB9TnZev-sVhTYrbhd	TIDAK ADA IKU ZI
42	STASIUN KIPM BIMA	75,32	https://drive.google.com/drive/folders/1epo9NY40oxYnKEvCH3tZtfXazORelwWk?usp=sharing	TIDAK ADA IKU ZI
43	STASIUN KIPM TAHUNA			TIDAK ADA IKU ZI
44	STASIUN KIPM BAU-BAU		https://drive.google.com/drive/folders/1XCh8i3hCovP2H1pfDVUdQhN8sgxFwAbk?usp=drive_link	TIDAK ADA IKU ZI
45	STASIUN KIPM MERAK	77,75	https://drive.google.com/drive/folders/15x_jiKzBKwJ4gMwSEhXTJM5aCIYwWQJ9?usp=sharing	
46	STASIUN KIPM MAMUJU	71,88	https://drive.google.com/drive/folders/1jTuuBx4tXxnhEwiRysV6mmCBFpck3JY	
47	BALAI UJI STANDAR KIPM	73,39	https://drive.google.com/drive/folders/1W-xdtQTvr8lGpLC3DYk8nA-pAQgz5hS?usp=drive_link	



Piagam Penghargaan

NOMOR B.2412/SJ.8/KP.540/VII/2025

DIBERIKAN KEPADA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MANADO**

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

FIN TUNA (Fasilitas Inovasi Teknologi Untuk Layanan)

Layanan Publik Secepat Tuna Berenang - Tidak Ada Lagi Antrean, Hanya Ada Solusi!

sebagai

**PESERTA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi

selaku Koordinator Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan